



# Penyelarasan RPJPD Kab/Kota Tahun 2025-2045 dengan Provinsi dan Nasional

**Amalia Adininggar Widyasanti**  
Deputi Bidang Ekonomi  
Kementerian PPN/Bappenas

Selasa, 6 Februari 2024





Kementerian PPN/  
Bappenas

# Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN serta Muatan Substansi Penyelarasan

SEB telah ditandatangani MenPPN/Ka Bappenas dan Mendagri pada tanggal 10 Januari 2024. Sesuai amanat SEB, Bappenas bersama Kemendagri melakukan **Fasilitasi, Koordinasi, dan Asistensi (FKA) kepada Provinsi dalam Penyusunan Rancangan Awal dan Evaluasi Raperda RPJPD** untuk menyelaraskan muatan RPJPD dengan RPJPN.

*Training of Trainers (ToT) Penyelarasan RPJPD Provinsi dengan RPJPN telah dilaksanakan pada tanggal 16-19 Januari 2024. Forum lanjutan **Penyelarasan Ranwal dengan Provinsi sedang berlangsung hingga tanggal 7 Februari 2024.***



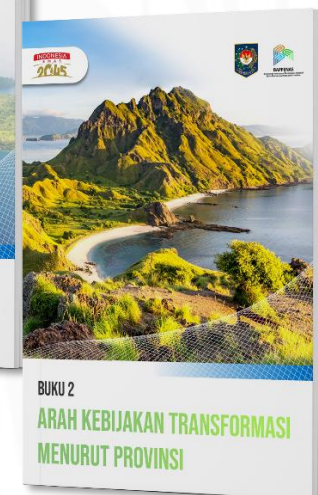
## Muatan substansi yang diselaraskan di Provinsi melalui FKA:

- i) Visi
- ii) 5 Sasaran Visi
- iii) 8 Misi Pembangunan
- iv) 17 Arah Pembangunan
- v) 45 Indikator Utama Pembangunan
- vi) Upaya Transformatif Super Prioritas
- vii) Arah Kebijakan Wilayah dan Sarana Prasarana

*Catatan: Poin 6 dan 7 menjadi kesatuan yang dituangkan menjadi Arah Kebijakan Transformatif per Provinsi dalam Buku II SEB*

***Penyelarasan butir 1-7 perlu memperhatikan kesesuaian:***

**Periodisasi dan Tahapan Pembangunan dengan RPJPN** yang disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan Daerah



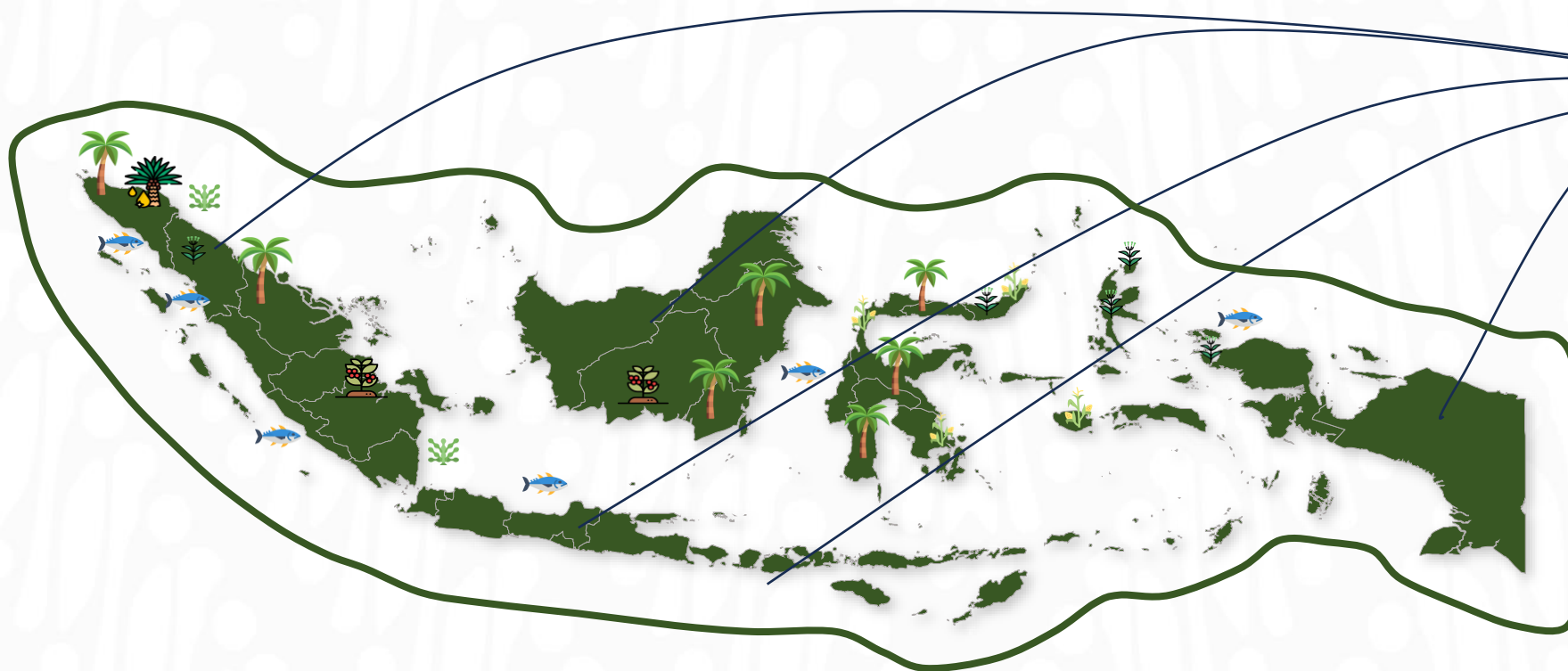


Kementerian PPN/  
Bappenas

# Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu kesatuan wilayah yang memiliki karakteristik berbeda di tiap Daerah. Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu mengawal tujuan nasional dengan mengoptimalkan potensi daerah melalui **otonomi daerah**. Oleh karena itu, perencanaan daerah mencakup perencanaan nasional yang disesuaikan dengan potensi daerah dalam **bingkai NKRI**

## Negara Kesatuan Republik Indonesia



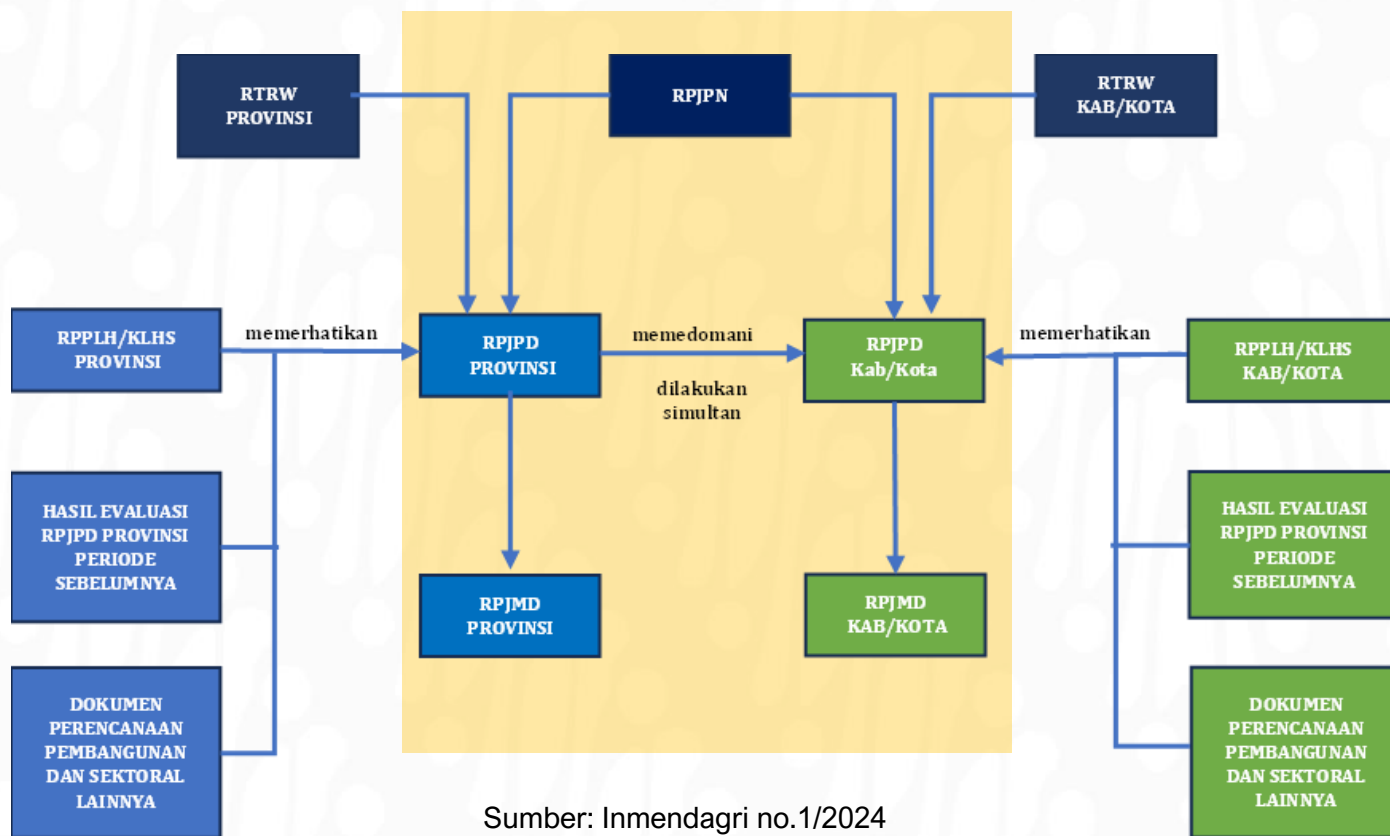
**Negara Nusantara  
Berdaulat, Maju, dan  
Berkelanjutan**



Kementerian PPN/  
Bappenas

# Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Aspirasi Daerah

## Keterkaitan RPJPD dengan dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor lainnya



Sumber: Inmendagri no.1/2024

### RPJPD 2025-2045

Dokumen turunan dari RPJP Nasional 2025-2045 dengan memperhatikan kekhususan spesifik daerahnya

Agenda transformasi nasional **memerlukan keselarasan arah dan langkah** semua elemen bangsa

Arah **kebijakan nasional dirumuskan sebagai paket minimal (standar)** yang perlu ditransmisikan ke daerah untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi antardaerah

Tiap daerah tetap punya ruang untuk **mengoptimalkan potensi** spesifik daerahnya





Kementerian PPN/  
Bappenas

# Ruang Penyesuaian oleh Daerah

Kab/Kota seyogyanya menyelaraskan RPJPD sesuai karakteristik daerah Provinsinya, dengan memperhatikan:

1

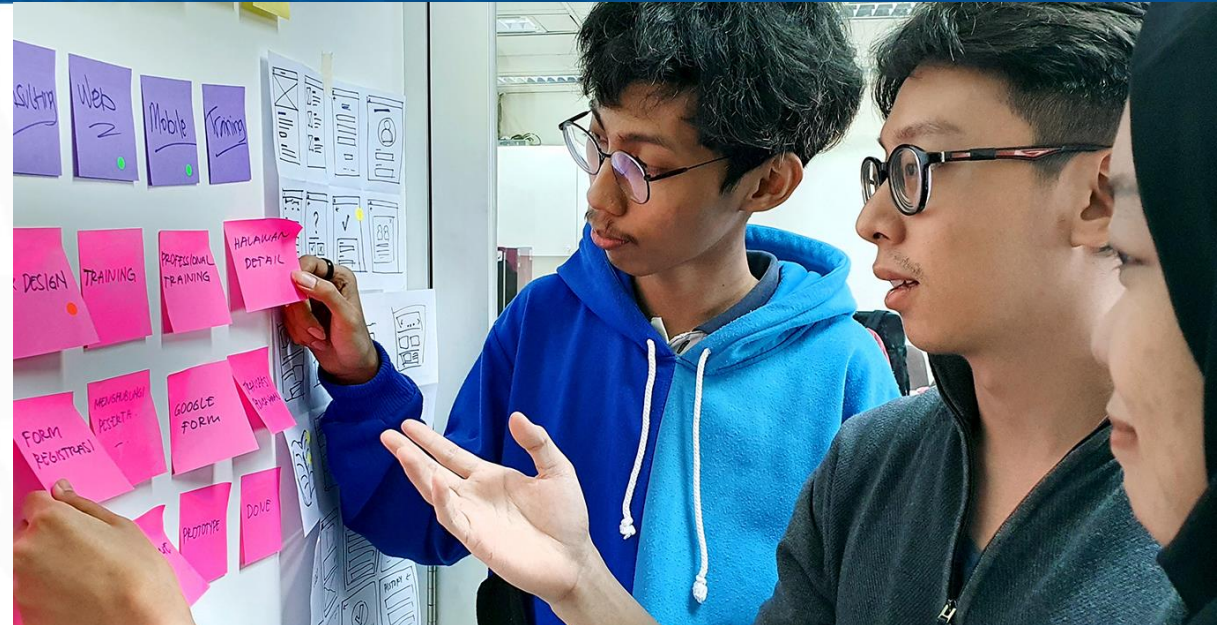
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

2

Penguatan Visi dengan tema spesifik pembangunan daya saing daerah

3

Arah kebijakan transformasi pembangunan daerah sesuai dengan karakter lokal







# Pedoman bagi Pemprov untuk Mengoordinasikan Penyusunan RPJPD Kab/Kota: Pokok-Pokok Koridor



1. **Pemerintah Daerah Provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan Fasilitasi, Koordinasi, dan Asistensi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** untuk memastikan keselarasan materi muatan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional.
2. RPJPD Kabupaten/Kota merupakan penerjemahan dari RPJPD Provinsi dan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kewenangan dan karakteristik Kabupaten/Kota, yang memuat:
  - **Visi** Kabupaten/Kota selaras dengan Visi Provinsi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota.
  - **Sasaran Visi** Kabupaten/Kota selaras dengan Sasaran Visi Provinsi disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota.
  - **Misi (Agenda Pembangunan)** Kabupaten/Kota selaras dengan Misi Provinsi disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota.
  - **Arah Kebijakan** Kabupaten/Kota selaras dengan Arah Kebijakan Provinsi memuat tahapan dan upaya transformatif yang disesuaikan dengan kewenangan dan karakteristik masing-masing Kabupaten/Kota serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
  - **Sasaran Pokok** Kabupaten/Kota selaras dengan Sasaran Pokok Provinsi yang disesuaikan dengan kewenangan dan karakteristik masing-masing Kabupaten/Kota serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).



Penyajian RPJP Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 **dapat merujuk pada bab-bab sebagai berikut dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Kabupaten/Kota:**

---

## **Bab I**

Pendahuluan

## **Bab II**

Gambaran Umum dan Kondisi Daerah

## **Bab III**

Permasalahan dan Isu Strategis

---

## **Bab IV**

Visi dan Misi Daerah

## **Bab V**

Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

## **Bab VI**

Penutup

---



Kementerian PPN/  
Bappenas

# Tantangan Penyelarasan RPJPD Kab/Kota dengan Provinsi

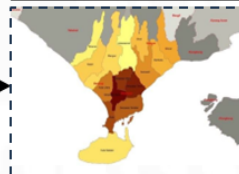
1. Data 5 Sasaran Visi dan 45 Indikator Utama Pembangunan tidak seluruhnya tersedia hingga level Kab/Kota
2. Visi dan Arah Kebijakan dalam RPJPD Kota/Kab harus sinkron dan selaras dengan RPJPD Provinsi, sehingga akan mendukung pencapaian target di Provinsi.

## Contoh Sinkronisasi Visi, Arah Kebijakan, dan Dukungan Indikator Kab/Kota dengan Provinsi

**Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional (Bali Nusra)**

**Clustering pengembangan Wilayah**

Kawasan  
WM Denpasar



Kawasan Afirmasi Bali Utara

Kabupaten Buleleng

Kabupaten Jembrana

Kabupaten Tabanan

Kabupaten Badung

Kabupaten Gianyar

Kabupaten Klungkung

Kota Denpasar

Kabupaten Karangasem

Kabupaten Klungkung

Kawasan Pariwisata  
dan Ekonomi Kreatif

Kawasan Pusat  
Kebudayaan Bali

Kawasan Industri  
Candikusuma

Kawasan Pengembangan Wisata Medis

Sumber: Peta Jalan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali

## Arah Kebijakan dalam SEB Buku II

Pengembangan kawasan pariwisata massal (mass tourism) dan pengembangan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan

## Contoh Penurunan Indikator

### RPJPD Kota Denpasar

Jumlah Wisatawan Mancanegara  
yang Menginap

**13.104\***

(2045)

Sumber Referensi Indikator:  
Satu Data Denpasar

\* Hanya contoh

### RPJPD Provinsi Bali

Jumlah Tamu Wisatawan  
Mancanegara (Hotel Berbintang)  
(Ribu Orang)

**25.908**

(2045)

Sumber: SEB Buku II





01

Surat Edaran Bersama (SEB) Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas merupakan langkah bersama untuk menyelaraskan muatan RPJPD dengan RPJPN agar tercipta koherensi dan terorkestrasinya arah pembangunan nasional.

02

Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN memuat strategi jangka panjang dengan mempertimbangkan:

1. Semangat otonomi daerah dalam bingkai NKRI
2. Potensi dan karakteristik daerah sesuai dengan tema wilayah
3. Memperkecil isu kesenjangan antar daerah
4. Pengawasan pencapaian sasaran pembangunan nasional

03

Bappenas bersama Kemendagri bersama-sama melakukan Fasilitasi, Koordinasi, dan Asistensi Penyusunan RPJPD 2025-2045 kepada Pemerintah Provinsi, dan dilanjutkan oleh Pemerintah Provinsi pada seluruh Kabupaten/Kota.





# TERIMA KASIH

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

